

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Media merupakan salah satu saluran komunikasi yang dipercaya masyarakat untuk mengetahui segala bentuk informasi. Media menjadi sangat penting, karena kenyataannya saat ini hampir seluruh lapisan masyarakat butuh akan informasi. Informasi yang mereka butuhkan tentunya harus dapat dipercaya, aktual dan objektif. Di era yang modern seperti saat ini, akses informasi bagi masyarakat jauh lebih mudah dengan hadirnya berbagai jenis media seperti majalah, surat kabar, televisi, radio dan media *online*. Ragam jenis media tersebut memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing.

Salah satu media yang cukup digemari masyarakat hingga saat ini yaitu surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu media cetak yang tergolong tua di Indonesia, namun keberadaannya masih tetap diminati meskipun kini banyak bermunculan jenis media lain yang menawarkan beragam keunggulan. Berita dalam surat kabar lebih terdokumentasi, sehingga dapat dibaca secara berulang-ulang, dimana saja dan kapan saja. Selain itu, mampu menyajikan informasi secara lebih mendalam sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi berita.

Jatuhnya rezim Soeharto pada 28 Mei 1998, membawa Indonesia menuju era baru yang disebut sebagai era reformasi. Era reformasi mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap pers di Indonesia. Media massa sebagai salah satu pilar demokrasi mendapatkan kebebasan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 di era Presiden B.J. Habibie sebagai jaminan atas kebebasan pers di tanah air. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, penerbitan media cetak baik itu surat kabar, majalah, dan tabloid tampak kian marak. Hal ini diawali dengan dipermudahnya mendapatkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) melalui keputusan Menteri Penerangan pada tahun 1998 yang dalam permohonannya hanya melampirkan akta notaris pendirian perusahaan penerbitan pers. Dengan kemudahan persyaratan tersebut maka penerbitan pers diseluruh Indonesia pada waktu itu mencapai 1065 buah (Supangkat, 2002 : 145). Sejak munculnya era reformasi, kebebasan pers di Indonesia sangat dijunjung tinggi, namun kebebasan tersebut bukan berarti bebas menyebarkan berita atau informasi apapun, akan tetapi bebas yang adil dan bertanggung jawab. Pers harus menyajikan informasi sesuai dengan standar kebenaran, akurasi, objektivitas serta keseimbangan.

Dalam perkembangannya menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, media tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan saja, namun media juga menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, pers harus mampu menjembatani semua pihak dengan memberikan sajian informasi yang

objektif. Menurut McQuail (2000:172) suatu pemberitaan dikatakan objektif apabila memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah akurat, jujur, lengkap, sesuai dengan kenyataan, bisa diandalkan, dan memisahkan antara fakta dan opini. Informasi juga harus seimbang dan adil, dalam artian tidak sensasional dan tidak bias.

Kenyataan saat ini bahwa media massa di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh individu-individu yang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik, sehingga keobjektivisan media perlu dipertanyakan kembali saat ini. Media massa sebagai saluran utama informasi seringkali belum sesuai dengan harapan, masih banyak berita yang belum mampu memenuhi unsur-unsur objektivitas dan cenderung memihak kepada pihak tertentu. Menurut Kovach dan Rossentiel (dalam Wicaksono, dkk, 2014:2) kuatnya cengkraman kapitalisme mengakibatkan media massa dihadapkan pada dilema antara keberpihakan kepada kebenaran dan kepentingan warga negara pada satu sisi dan pada sisi lain harus mengabdikan kepada kepentingan kapitalisme, sehingga lambat laun media mengalami pelemahan. Akibatnya, media massa mengalami kondisi yang tragik, berpindah dari kontrol negara menjadi di bawah kekuatan capital dan melahirkan otoritarian baru yang disebut otoritarian kapital (Siregar dalam Wicaksono, dkk, 2014:2).

Pengaruh kepemilikan media memberikan dampak yang berbeda-beda di setiap media, bahkan dampak yang ditimbulkan bisa sampai pada titik di mana media massa tersebut tidak mampu menerapkan prinsip objektivitas dalam pemberitaannya. Pada tahun 2012, jumlah pengaduan yang masuk ke

Dewan Pers berjumlah 470 pengaduan terkait pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sementara pada tahun 2014, sudah meningkat hingga berjumlah 544 pengaduan. Jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan meliputi tiga hal yaitu pemberitaan yang tidak berimbang, tidak ada konfirmasi dari pihak terkait dalam pemberitaan dan adanya opini yang menghakimi. Semakin meningkatnya aduan, maka bisa dibilang ada masalah dalam media massa di Indonesia (Ayun, 2016 ).

Salah satu berita yang berhasil menyedot perhatian publik dipenghujung tahun 2016 adalah berita mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Peristiwa tersebut bermula saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016. Saat berpidato dihadapan warga, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan tersebut disertai kutipan surat Al Maidah ayat 51.

Potongan video Ahok yang mengutip surat Al Maidah ayat 51 tersebut kemudian menuai kontroversi, karena berkaitan dengan Al Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam. Isu berkembang begitu cepat dan menyita perhatian sebagian besar umat muslim dan berbagai kalangan di Indonesia. Bagi sebagian pihak hal tersebut dianggap telah menistakan agama, tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengecam bahwa perkataan Ahok tersebut telah menistakan agama dan menghina ulama, hingga mereka berkesimpulan bahwa Ahok harus dihukum. Kekecewaan publik atas pernyataan Ahok tersebut ternyata tidak dapat bendung lagi, meskipun Ahok

telah meminta maaf atas perkataannya tersebut. Buntut dari permasalahan tersebut ditandai dengan munculnya berbagai macam aksi oleh gerakan-gerakan Ormas Islam di Indonesia yang sering memadati Ibu Kota Jakarta. Atas nama kebebasan demokrasi, massa turun ke jalan menuntut proses hukum Ahok segera dituntaskan demi menjamin rasa keadilan di masyarakat.

Setelah berita ini mencuat, Ahok selalu menjadi *trending topic* di berbagai media massa baik tingkat nasional maupun daerah, kegaduhannya tidak saja terdengar di wilayah DKI Jakarta bahkan tersebar keseluruh pelosok negeri. Posisi Jakarta sebagai ibu kota negara menjadikan Jakarta sebagai corong bagi perpolitikan di Indonesia. Beragam pandangan mengenai suatu kasus tentunya tidak lepas dari media yang memberikan informasi kepada masyarakat, media dalam hal ini tentu memiliki kekuatan membentuk pemikiran masyarakat mengenai suatu realitas tertentu.

Melihat kegaduhan serta kontroversi dari pernyataan Ahok tersebut mengindikasikan bahwa isu agama mudah ditarik ke ranah politik pilkada. Ketua bidang Penyiaran Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Indonesia Revolusi Riza mengatakan, kasus yang menimpa Ahok ini bukan semata kasus pidana biasa, kasus ini tergolong sensitif. AJI juga meminta media untuk menjadikan kepentingan publik dan bangsa sebagai pertimbangan utama, daripada soal faktor rating atau perolehan iklan yang bisa didapatkan dari pemberitaan kasus itu (Rezkisari :2016). SARA merupakan isu publik yang kerap digunakan dalam konteks politik di Indonesia. Aksi saling serang

antar politisi dan tokoh agama umumnya terjadi saat pesta demokrasi dilaksanakan di negara sangat multikultur.

Ahok merupakan salah satu sosok yang kerap kali diserang menggunakan isu SARA. Hal tersebut terjadi sejak dirinya memutuskan untuk mencalonkan diri bersama Joko Widodo sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu. Isu tersebut saat ini menjadi sangat lekat dengan kepribadian Ahok yang beretnis Tionghoa sekaligus pemeluk agama Kristen Protestan. Dalam kasus ini tidak hanya aspek agama yang disinggung, akan tetapi aspek kebudayaan suku asli juga berperan cukup besar.

Media dan konflik agama tentu memiliki hubungan yang erat. Konflik agama bagi pekerja media merupakan bahan pemberitaan yang menarik bagi masyarakat. Faktor masyarakat di Indonesia yang mayoritas mempunyai keyakinan agama, maka masyarakat akan tertarik dengan sesuatu yang kontroversial mengenai isu agama. Media massa dalam hal ini menjadi faktor yang sangat penting dalam penyebaran budaya dan stereotip tertentu di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat tentu berharap media mampu memberikan ruang yang relatif berimbang kepada para pihak yang pro dan kontra terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, sehingga masyarakat dapat dengan benar menentukan sikap atas sebuah kasus.

Kode Etik Jurnalistik kembali memperjelas mengenai pentingnya keobjektifan seorang wartawan. Kode Etik Jurnalistik pasal 3 menegaskan

bahwa wartawan Indonesia harus membuat pemberitaan yang berimbang tanpa mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (Abrar, 2015: 91). Sedangkan pasal 8 menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menulis/menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani (Abrar, 2015:93).

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai objektivitas media dalam menyajikan berita mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi kuantitatif, menggunakan beberapa indikasi objektivitas menurut teori J. Westerthal. Dalam penelitian ini, peneliti memilih surat kabar *Kompas* sebagai media yang akan diteliti. *Kompas* merupakan harian nasional terbesar di Indonesia dimiliki oleh mantan jurnalis senior Jakob Oetama dan mulai terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1965. Motto *Kompas* adalah “Amanat Hati Nurani Rakyat” yang yang mengusung semangat jurnalisme pembangunan yang menjunjung tinggi nilai kemajemukan Indonesia.

Kepemimpinan *Kompas* berada di tangan Jakob Oetama sebagai pemegang saham terbesar yang berhasil membawa *Kompas* kedalam era industri dan berorientasi bisnis. Awalnya *Kompas* merupakan media pembawa kepentingan partai katolik, akan tetapi pada perkembangannya

*Kompas* mencoba untuk menjadi koran yang independen dan melepaskan diri dari agama. Dalam prosesnya, *Kompas* sering disebut sebagai jurnalisme kepiting yang menerapkan gaya berhati-hati terutama ketika mengulas peristiwa konflik.

*Kompas* menduduki peringkat pertama sebagai surat kabar terpopuler di Indonesia dan Asia Tenggara. Jumlah pembacanya mencapai 1.850.000 orang perhari di tahun 2011 dan oplah rata-rata mencapai 500.000 eksemplar pada hari Senin hingga Jumat dan 600.000 eksemplar pada akhir pekan (Santosa, 2010 :3). Dengan tiras sebesar itu menjadikan *Kompas* sebagai referensi utama informasi oleh masyarakat Indonesia, sehingga keberadaannya sangat berpotensi mempengaruhi opini publik lewat pemberitaannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana objektivitas pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di surat kabar *Kompas* ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui objektivitas *Kompas* dalam menyajikan berita kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian pada bidang komunikasi massa dalam bentuk media cetak surat kabar.

#### b. Manfaat Praktis

a) Bagi surat kabar yang bersangkutan penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengkajian serta evaluasi kinerja khususnya *Kompas* dalam melakukan peliputan berita yang bernuansa agama.

b) Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat memunculkan sikap kritis masyarakat terhadap sajian berita yang ditampilkan oleh media, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melihat fakta secara benar terutama mengenai isu agama.

## E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiarisme, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Penelitian pertama, yakni penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Afiq Naufal dan Haryanto Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul penelitian Studi Analisis Isi Tentang Obyektivitas Berita Konflik Antara Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta Periode 18 Januari -31 Maret 2015 pada Portal Berita *Detik.com*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari indikator objektivitas berita yaitu faktualitas dan imparsialitas, *Detik.com* mampu memenuhi sisi faktualitas, namun pada sisi imparsialitas belum dapat terpenuhi karena masih banyak ditemukan berita yang hanya meliput satu sudut pandang dan dari sisi negatif.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Georgene Suryani mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dengan judul penelitian Studi Analisis Isi Pemberitaan *VOA-Islam.com* Terkait Aksi Penolakan Terhadap Ahok Selama Periode September-Oktober 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan terkait aksi penolakan terhadap Ahok pada *VOA-Islam.com* belum memenuhi unsur standar objektivitas, khususnya pada prinsip keseimbangan dan netralitas.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sumartono Dosen FIKOM Universitas IDONUSA Esa Unggul, Jakarta dengan judul Objektivitas Konflik Ambon pada Pemberitaan *Kompas* dan *Republika*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum surat kabar *Kompas* lebih hati-hati dan objektif, sedangkan surat kabar *Republika* dalam pemberitaan mengenai konflik Ambon terlihat lebih emosional dan lebih menaruh simpati kepada kelompok muslim. Keberpihakan surat kabar *Republika* terhadap kelompok muslim tersebut dapat dilihat dari pemilihan topic serta judul beritanya.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, penelitian ini memiliki persamaan metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode analisis isi objektivitas media, akan tetapi memiliki perbedaan tentang isu yang diangkat yaitu peneliti memfokuskan pada isu tentang kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Adapun media yang digunakan dalam dua penelitian terdahulu yaitu media *online* sedangkan satu penelitian yang lain menggunakan dua media cetak surat kabar yaitu *Kompas* dan *Republika*, sama seperti halnya dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan media cetak surat kabar. Adanya jenis media yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan yang berbeda pula.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Praktik Jurnalisme dalam Surat Kabar**

Jurnalistik berasal dari kata *journal* atau jurnal. Dalam bahasa Perancis, *journal* berarti “catatan” atau “laporan harian”. Secara teknis, jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak luas dengan secepat-cepatnya (Sumadiria, 2006:2).

Sedangkan menurut Yosef (2009 :13) jurnalistik cetak (*printed journalism*) ialah proses mencari, mengumpulkan, menyeleksi, menulis dan menyebarkan informasi pada khalayak melalui media massa cetak, seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Penyebaran media cetak ini diterbitkan sangat banyak, karena dilakukan secara periodik pada waktu tertentu yaitu harian, mingguan, dwi mingguan atau bulanan.

Jurnalistik media cetak dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor verbal dan visual. Verbal, menekankan pada kemampuan dalam memilih dan menyusun kata dalam rangkaian kalimat yang efektif dan komunikatif. Visual, merujuk pada kemampuan dalam menata, mendesain tata letak atau hal-hal yang menyangkut penampilan luar media cetak atau surat kabar (Sumadiria, 2005:4). Kegiatan jurnalistik merupakan kegiatan yang memungkinkan media massa atau pers bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. Jurnalistik masih dianggap sebagai sumber informasi yang akurat dimasyarakat hingga saat ini. Sebagian besar masyarakat biasanya

memperoleh informasi dengan cara mengakses media-media yang ada, akan tetapi informasi yang diberikan oleh media tidak selamanya selalu benar.

Kovach dan Rosenstiel dalam buku *Sembilan Elemen Jurnalisme* kemudian menjelaskan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip jurnalisme bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini perlu diterapkan agar tujuan utama jurnalisme yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga mereka bisa hidup bebas dan mengatur dirinya sendiri dapat terwujud. Berikut gambaran jurnalisme yang dimaksud (Kovach dan Rosenstiel, 2003:12) yaitu :

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah kebenaran.

Jurnalisme bukan mengejar kebenaran dalam pengertian yang absolute dan filosofis, tetapi bisa dan harus mengejar kebenaran dalam pengertian yang praktis. Kebenaran jurnalistik ini adalah suatu proses yang dimulai dengan disiplin dan professional dalam pengumpulan dan verifikasi fakta. Walaupun kita hidup di dunia dengan suara-suara yang terus berkembang, akurasi tetap menjadi dasar di mana segala sesuatu dibangun di atasnya..

2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga.

Jurnalisme berada diantara tiga pihak, pembaca, pengiklan, dan publik. Masing-masing pihak memiliki kepentingan, namun jurnalisme harus menjaga kesetiaan kepada warga kepentingan publik yang lebih luas. Dalam hal ini prioritas utama mereka adalah warga.

3. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi.

Disiplin verifikasi adalah hal yang memisahkan jurnalisme dan hiburan, fiksi, propaganda, atau seni. Verifikasi adalah proses menyaring desas-desus, isu, gosip, prasangka yang keliru dan sebagainya. Verifikasi menjamin adanya akurasi, yang pada hakikatnya memberikan hak masyarakat atas suatu fakta tanpa tendensi dan keberpihakan. Disiplin verifikasi dapat tercermin melalui pencarian narasumber, membuka sebanyaknya sumber berita, dan meminta komentar dari banyak pihak (Kovack & Rosenstiel, 2003:87-106).

4. Wartawan harus menjaga independensi terhadap sumber berita.

Wartawan harus sebisa mungkin bersikap independen, tanpa takut dan tanpa tekanan, dan tanpa kepentingan, karena syarat dasar dari jurnalisme adalah kebebasan. Namun dalam banyak kasus, wartawan tidak bisa independen secara total karena bekerja untuk majikan yang punya kekuasaan dan uang.

Setiap pembaca berhak tahu apakah seorang reporter terlibat aktif dalam masalah atau dengan orang yang ia liput (Kovach dan Rosenstiel, 2006:131). Berkaitan dengan hal tersebut maka keterbukaan wartawan tentang di pihak mana dia berada, bagaimana cara dia meliput dan menuliskan berita sangat diperlukan, sehingga pembaca waspada dan menyadari hal tersebut.

5. Wartawan harus menjadi pemantau kekuasaan.

Prinsip ini menekankan pentingnya *watchdog* yang bermakna tidak sekedar memantau pemerintah, tapi juga meluas hingga semua lembaga

di pemerintah. Pemantauan oleh media ini diberlakukan terhadap semua lembaga yang memiliki keterkaitan kuat dengan kehidupan banyak orang. Masyarakat mengharapkan berita yang lengkap sekaligus mendalam mengenai apa yang terjadi pada kekuasaan yang menaungi mereka. Keinginan tersebut didasari bahwa apa yang dilakukan pemerintah atau yang mempunyai kekuasaan akan berdampak langsung terhadap masyarakat serta mendorong para pemimpin untuk tidak berlaku sewenang-wenang sebagai pejabat.

6. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik dan komentar publik.

Diskusi publik ini bisa melayani masyarakat dengan baik jika mereka mendapatkan informasi berdasarkan fakta, serta bukan atas dasar prasangka atau dugaan-dugaan. Selain itu, berbagai pandangan dan kepentingan dalam masyarakat harus terwakili dengan baik. Akurasi dan kebenaran mengharuskan titi-titik persamaan dasar, sehingga penanggulangan masalah dimungkinkan.

7. Wartawan harus membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan.

Tugas jurnalisme adalah menemukan cara untuk membuat hal-hal yang penting menjadi menarik dan relevan untuk dibaca, didengar, atau ditonton. Karena tujuan jurnalisme adalah menyediakan informasi kepada masyarakat agar mereka mengerti dunia. Tantangan pertama jurnalisme yaitu mengumpulkan informasi yang penting untuk kehidupan bermasyarakat. Sementara tantangan kedua, membuatnya lebih bermakna menarik dan relevan (Kovach & Rosenstiel, 2003:190-193).

8. Wartawan harus menyiarkan berita koprehensif dan proporsional.

Jurnalisme adalah kartografer atau pembuat peta modern. Ia menghasilkan peta bagi warga untuk mengambil keputusan dalam kehidupan mereka sendiri. Itulah manfaat dan alasan ekonomi kehadiran jurnalisme. Seperti halnya peta, nilai jurnalisme bergantung kepada kelengkapan dan proporsionalitas (Kovach & Rosenstiel, 2003:212-213). Menjaga berita agar tetap professional dan tidak menghilangkan hal-hal yang penting termasuk dasar dari kebenaran.

9. Wartawan harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Setiap wartawan harus punya rasa etika dan tanggung jawab personal. Sebagai panduan moral demi menyajikan berita yang akurat, adil,imbang, berfokus pada warga, berpikiran independen, dan berani (Kovach dan Rosenstiel, 2003: 235-236).

Sembilan Elemen Jurnalisme memberikan gambaran tentang apa yang ideal yang seharusnya dikembangkan oleh wartawan. Sebagai pihak yang bertugas menyampaikan informasi, wartawan dalam melaksanakan, hak, fungsi dan kewajibannya harus menghormati hak asasi setiap orang. Berkaitan dengan hal tersebut wartawan/jurnalis dituntut profesional serta terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Demi tercapainya hak publik untuk memperoleh informasi yang objektif, seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada elemen-elemen jurnalisme serta menaati kode etik jurnalistik. Hal tersebut dirasa perlu demi menjaga kepercayaan publik serta menegakkan integritas profesionalisme jurnalis.



Kegiatan jurnalistik merupakan kegiatan yang menghasilkan sebuah karya yang disebut berita. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak (Agus dan Zuhri, 2015:82). Definisi lain dikemukakan oleh Nancy Nasution yang mendefinisikan berita sebagai laporan tercepat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ingin diketahui oleh umum, dengan sifat aktual, terjadi dilingkungan pembaca, akibat peristiwanya berpengaruh kepada pembaca (Suryawati, 2011:68). Dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan menurut para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berita merupakan laporan tercepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang penting untuk diketahui oleh publik secara luas, karena berita tersebut dapat berpengaruh kepada pembaca.

Apa yang menarik perhatian pembaca haruslah terdapat dalam sebuah berita, akan tetapi dari semua itu yang paling penting ialah berita harus ditulis berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Untuk membuat berita paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Agus dan Zuhri, 2015:84) :

1. Menjaga objektivitas dalam pemberitaan.
2. Fakta tidak boleh diputar balikkan sedemikian rupa hingga tinggal sebagian saja.
3. Berita itu harus menceritakan segala aspek secara lengkap.

Suatu fakta dapat dikatakan berita, apabila memenuhi syarat telah dipublikasikan. Berita dapat disebarluaskan kepada khalayak dengan memanfaatkan media, salah satunya adalah surat kabar. Surat kabar menjadi salah satu media cetak yang paling populer dan merupakan media massa tertua di dunia. Surat kabar sudah ada sejak sebelum ditemukannya mesin cetak oleh John Gutenberg pada tahun 1450 di Jerman. Pada saat itu, surat kabar masih ditulis dengan tangan.

Surat kabar adalah penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita, karangan-karangan dan iklan yang dicetak dan terbit secara tetap dan periodik serta dijual untuk umum. Surat kabar merupakan alat komunikasi yang bertugas sebagai penyalur berita (Assegaf, 1991:140). Surat kabar memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan jenis media lain yaitu surat kabar/koran lebih terdokumentasi, sehingga bisa dibaca kapan saja dan dimana saja. Selain itu, surat kabar mampu menyajikan informasi secara lebih mendalam sehingga memudahkan pembaca untuk lebih memahami isi berita.

## **2. Pemberitaan Konflik Agama dalam Surat Kabar**

Berita merupakan salah satu karya jurnalistik yang menunjang kebutuhan masyarakat akan berbagai informasi. Dalam sebuah berita terdapat beberapa nilai berita (*news values*) yang harus dipenuhi untuk mengukur layak atau tidaknya suatu peristiwa itu diberitakan. Konflik menjadi salah satu dari beberapa nilai berita yang paling diminati oleh media massa. Bahkan bukan hanya media massa saja, khalayak pembaca pun dinilai sangat antusias dengan

berita-berita yang mengandung nilai konflik. Sudibyo (2001:73) menjelaskan bahwa sebuah konflik bagaimana pun membutuhkan pemberitaan media. Pihak-pihak yang bertikai membutuhkan publikasi media atas klaim-klaim mereka. Khalayak juga sangat tergantung pada pemberitaan media untuk mengetahui perkembangan konflik. Tidak heran jika konflik menjadi isu yang diminati dan diburu untuk dijadikan bahan pemberitaan oleh para pekerja media.

Semakin besar konflik yang terkandung dalam suatu peristiwa, semakin tinggi pula nilai beritanya. Istilah "*bad news is good news*" masih berlaku dalam praktik jurnalisme, media massa secara sadar atau tidak telah melakukan proses komodifikasi berita konflik, dengan tujuan berita tersebut memenuhi kriteria layak jual. Menurut Anto (2007:6) media sering mengalami persoalan ketika mewartakan konflik, karena panasnya konflik berbanding lurus dengan oplah atau tiras yang diperoleh media. Dengan sendirinya media massa mempunyai kepentingan langsung dalam eskalasi dan kelanggengan konflik.

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok), yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher dalam Sumartono, 2005: 49). Konflik dapat terjadi dalam kelompok-kelompok sosial karena timbul rasa curiga dan adanya *stereotype* negatif yang dilontarkan kelompok yang satu ke kelompok yang lain dalam proses interaksi sosial. Rasa curiga disebabkan kepercayaan deterministik bahwa hanya pandangan sendirilah yang benar, sedang yang

lain salah dan buruk, sehingga tak ada tempat untuk bersikap yang dijiwai oleh rasa toleransi (Hasan dan Mursalin, 2011:75).

Konflik tentu bukanlah hal yang baru lagi di Indonesia, hampir setiap hari media memberitakan berbagai macam jenis konflik yang sedang terjadi Indonesia. Dari sekian banyak konflik yang terjadi, konflik agama merupakan salah satu konflik yang sangat menarik untuk dikaji. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia sebagai negara multi etnis yang memiliki ragam etnis, budaya, dan agama yang sering disebut dengan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) merupakan potensi terpendam sebagai pemicu konflik. Konflik yang melibatkan agama menjadi ancaman yang serius bagi integrasi bangsa Indonesia.

Menurut Hasan dan Mursalin (2011:76) dalam konteks sekarang, ajaran agama sering diklaim sebagai penyebab timbulnya konflik dan kekerasan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa indikator atau faktor yang berpotensi menjadikan agama sebagai sumber konflik dan kekerasan, diantaranya perbedaan pemahaman dan penafsiran yang dicampuri berbagai aspek dalam kehidupan sosial masyarakat seperti politik, ekonomi dan lain-lain. Begitu sensitifnya persoalan agama di Indonesia, sehingga konflik sosial dan politik yang sebenarnya di luar agama pun seringkali ditarik ke wilayah agama untuk mendapatkan dukungan yang lebih dari pemeluknya (Muqoyyidin, 2012:319).

Relasi media dan konflik agama, menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan, mengingat dampak yang mampu diciptakan media terhadap khalayak sangatlah besar, selain menimbulkan kerugian secara materi, konflik berlatar agama juga sangat berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Hal tersebut dikarenakan media sebagai saluran informasi mempunyai peran yang penting dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa. Menurut Siebert dalam (Sumartono,2005:48) pemberitaan media mengenai konflik dapat membawa pengaruh pada dua hal. Pertama, pemberitaan media justru memperluas eskalasi konflik. Kedua, pemberitaan dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik. Dari dua kemungkinan tersebut, media seringkali malah memperluas eskalasi konflik dan memantik konflik baru terjadi.

Sebagai contoh, berita yang menjadi sorotan banyak pihak adalah mengenai pembakaran 7 Vihara dan kelenteng yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatra Utara oleh sejumlah warga beragama Islam pada tanggal 29 Juli 2016. Konflik tersebut dipicu oleh keberatan salah satu penduduk keturunan Tionghoa yang merasa suara adzan maghrib yang berasal dari pengeras suara mengganggu karena terletak persis di depan rumah. Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya warga bersama aparat setempat telah melakukan mediasi, namun usaha tersebut gagal karena adanya pesan berantai yang menyebutkan bahwa masjid dilarang mengumandangkan adzan. Tanpa mengecek kebenaran berita tersebut warga setempat tersulut

kemarahannya dan membakar tidak hanya tempat ibadah namun, juga, mobil, motor dan becak.

Selain itu, fenomena tersebut juga dapat dicermati dari konflik Ambon. Konflik yang semula hanya terjadi di pulau Ambon meluas hingga ke Kepulauan Maluku dan kemudian berhasil menjadi isu nasional. Secara umum, konflik Ambon berlangsung kurang lebih empat tahun dari tahun 1999 sampai tahun 2002, namun dalam kurun waktu tersebut konflik tidak berlangsung secara terus menerus, ada kalanya konflik tersebut mereda dengan disertai perjanjian dan perdamaian, dan kemudian memanas lagi. Banyak kerugian yang timbulkan dari konflik tersebut mulai dari kerusakan dan kehancuran fisik maupun tatanan sosial yang selama ini sudah dibangun dengan baik.

Sebagian masyarakat menilai berbagai kerusuhan yang terjadi di Ambon seringkali dinilai sebagai dampak dari pemberitaan media. Pusat Penanggulangan Krisis Persatuan Gereja Indonesia (PGI) pernah memprotes pemberitaan media, karena media telah dianggap memutarbalikkan fakta dan penuh dengan kebohongan. Berita media menyebutkan terdapat warga Rinjani yang beragama Islam tertembak di dalam masjid oleh warga Ahuru yang beragama Kristen, akan tetapi PGI menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi adalah korban sudah meninggal oleh tembakan aparat keamanan lalu dibawa oleh warga ke dakan masjid. Akibat kesalahan pemberitaan oleh media, terutama media yang terbit di

Jakarta akhirnya menimbulkan kemarahan warga Ambon dan Maluku yang kemudian menyulut konflik menjadi besar.

Hal tersebut membuktikan, bahwa melaporkan peristiwa konflik kepada masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, dibutuhkan kehati-hatian dalam memberitakan konflik sebagai sebuah isu yang sensitif dalam masyarakat. Diperlukan cek dan ricek agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalisisme yang benar.

Pemberitaan media yang justru memperparah konflik, jelas akan merugikan bagi pihak yang berkonflik maupun masyarakat luas. Pemberitaan yang tidak objektif dapat berdampak buruk bagi pembaca yang bahkan mungkin tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut. Timbulnya dendam, kebencian, *stereotyping* dan pelabelan terhadap satu pihak sering kali muncul sebagai akibat dari konsumsi berita konflik yang memprovokatori.

### **3. Objektivitas Pemberitaan dalam Surat Kabar**

Prinsip utama dalam jurnalisisme adalah objektivitas. Objektivitas dibutuhkan dengan tujuan supaya berita yang nantinya disajikan sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Sebagai suatu konsep, objektivitas sangat sulit dan rumit untuk dijelaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Hal tersebut didukung

pula dengan pernyataan Michael Bungeja seorang pengajar jurnalisme di Iowa State yang mengatakan bahwa objektif adalah melihat dunia seperti apa adanya, bukan bagaimana yang anda harapkan semestinya (Ishwara, 2005:44).

Objektivitas berita merupakan suatu keadaan berita yang disajikan secara utuh dan tidak bersifat memihak salah satu sumber berita, yang bertujuan untuk memberi informasi dan pengetahuan kepada konsumen (Flournoy, 1986:48). Mengacu pada pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan di atas, objektivitas berita merupakan cara menyajikan sebuah berita berdasarkan fakta secara seimbang tanpa adanya unsur keberpihakan.

Prinsip objektivitas mempunyai fungsi yang tidak boleh dianggap remeh. Hal tersebut dikarenakan ketika wartawan menjalankan tugasnya mulai dari mengumpulkan fakta di lapangan hingga menyajikannya dalam bentuk berita di surat kabar, terdapat berbagai kepentingan yang terlibat dalam proses penanganan berita, sehingga akan berdampak terhadap kebenaran berita yang disajikan oleh media. Objektivitas pemberitaan diperlukan dalam rangka mempertahankan kredibilitas, dalam hal ini adalah profesionalitas wartawan dalam menyajikan sebuah berita.

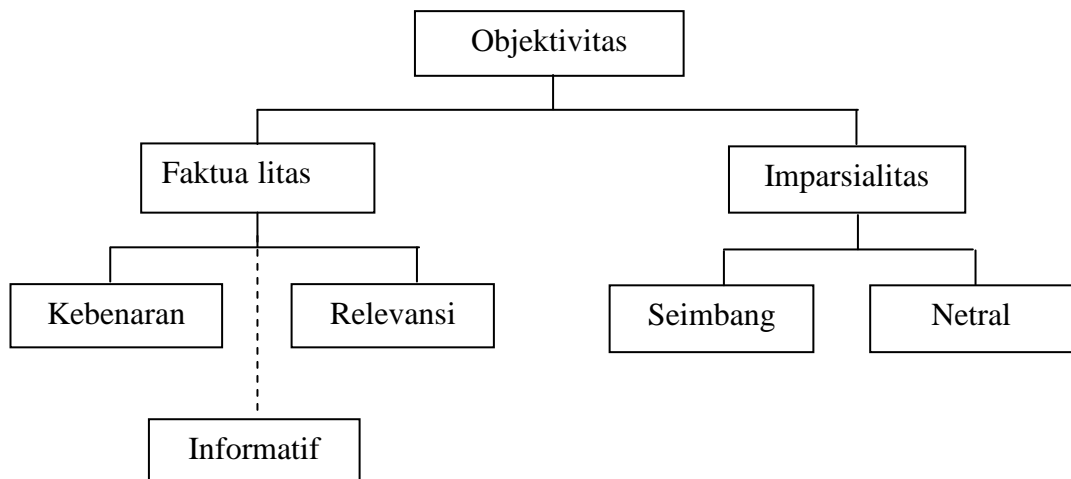
Wartawan selalu dituntut untuk bekerja profesional dan objektif dalam menyajikan berita, karena kebenaran sangat erat kaitannya dengan kualitas berita yang disajikan. Hal tersebut sesuai dengan dengan isi pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (dalam Kusumaningrat,



2006:47) yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Penerapan prinsip objektivitas dalam pemberitaan sangat berdampak terhadap kualitas berita yang dihasilkan. Suatu pemberitaan dikatakan objektif apabila memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah akurat, jujur, lengkap, sesuai dengan kenyataan, bisa diandalkan, dan memisahkan antara fakta dan opini. Informasi juga harus seimbang dan adil, dalam artian tidak sensasional dan tidak bias (McQuail, 2000:172). Objektivitas berita menjadi sesuatu yang sangat penting ketika menyajikan sebuah berita, karena berita yang dimuat oleh surat kabar nantinya akan dibaca oleh banyak orang. Penyajian berita yang tidak objektif dapat menimbulkan banyak ketidakseimbangan, cenderung menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

Berbagai macam kriteria disodorkan untuk menilai objektivitas sebuah berita. Kemudian J. Westerthal mengembangkan kerangka konsep dasar untuk meneliti dan mengukur objektivitas media. Berikut adalah skema objektivitas menurut Westerthal :



**Gambar.1. Skema Objektivitas Westerthal (McQuail, 1992:196)**

Konsep dasar yang dikembangkan oleh J. Westerthal melibatkan dua dimensi yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain, yaitu kognitif dan evaluatif. Dimensi kognitif mencakup faktualitas yang merupakan kualitas informasi yang terkandung dalam berita. Sedangkan dimensi evaluatif mencakup imparsialitas atau ketidakberpihakan dalam berita.

a. Faktualitas Berita

Kriteria faktualitas mengandung tiga hal yakni kebenaran (*truth*), relevansi (*relevance*) dan juga *informativeness* berita. *Truth* digunakan untuk mengukur tingkatan fakta yang disajikan dalam berita. meskipun banyak perdebatan terkait apa itu kebenaran dalam pengertian jurnalisme, namun *truth* biasanya dihubungkan dengan *factualness*, *accuracy* dan juga *completeness* (5W+1H) (Kriyantono, 2006). Sedangkan untuk mengukur relevansi dilihat dari standar jurnalistik

yang terkandung didalamnya, seperti adanya *significance*, *timelines*, *magnitude*, *proximity*, *prominance* dan *human interest*. Relevansi dan sensasionalisme adalah hal yang bertentangan. Berita dikatakan mengandung unsur sensasionalisme ketika lebih mengacu pada *human interest*, personalisasi atau karakteristik hiburan lainnya dalam berita. Nilai informasi yang terkandung akan dianggap kurang dan semakin tidak relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat (McQuail, 1992:200).

b. Imparsialitas

Kriteria Imparsialitas ini dikaitkan dengan sikap netral dan seimbang wartawan dalam menyajikan fakta. Hal tersebut berarti bahwa wartawan tidak menggabungkan opini pribadi dan tidak memihak kepada salah satu sumber berita. Dimensi imparsialitas terdiri dari dua sub dimensi yaitu *balance* (keseimbangan) dan *neutrality* (netralitas). Netralitas berkaitan dengan aspek penyajian suatu berita, termasuk di dalamnya penempatan berita, aspek-aspek yang ditonjolkan, maupun pemilihan kata-kata yang digunakan (Mc Quail, 1992:233). Dalam skema netralitas McQuail, tolak ukur dalam netralitas meliputi *non evaluative* (ada tidaknya percampuran fakta dan opini ) dan *non sensational* (kesesuaian antara judul dengan isi berita).

Selanjutnya, dimensi *balance* (keberimbangan) berkaitan dengan keseimbangan dalam pemberitaan. Dimensi ini terbagi menjadi dua yakni *equal or proportional acces* dan *even handed evaluation*. *Equal*

*or proportional acces* adalah seberapa banyak ruang yang diberikan media untuk menyajikan pendapat atau kepentingan dari berbagai pihak, apakah hanya satu sisi saja yang ditonjolkan atau dari berbagai sisi. Sedangkan, *even handed evaluation* dapat dijadikan indikator evaluasi sebuah berita apakah positif, negatif atau netral (McQuail, 1992:224).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berita yang objektif paling tidak harus mengandung unsur faktualitas dan imparialitas. Faktulitas berkaitan dengan kebenaran yang di dalamnya memuat akurasi (tepat dan cermat dalam membuat sebuah berita) dan mengaitkan sesuatu yang relevan untuk diberitakan. Sedangkan imparialitas mensyaratkan adanya keseimbangan (*balance*) dan netralitas dalam mengungkap suatu peristiwa. Dengan demikian, informasi yang objektif selalu mengandung kejujuran, kecukupan data, benar dan memisahkan diri dari fiksi dan opini. Apabila terdapat satu saja sub dimensi yang tidak objektif, maka media tersebut dapat dikatakan tidak objektif dalam memberitakan suatu peristiwa.

## F. Definisi Konseptual

Penelitian ini akan membicarakan tentang objektivitas surat kabar *Kompas* dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Media mempunyai peran dalam menyajikan informasi bagi masyarakat luas dengan berita sebagai bagian terpenting.

Idealnya berita yang baik adalah berita yang ditulis berdasarkan unsure-unsur objektivitas berita, berita tidak memihak, berita yang tidak mencampurkan unsur opini dan fakta, serta berita yang menyajikan kejadian atau peristiwa yang sebenar-benarnya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur objektivitas pemberitaan yaitu :

1. Faktual (*factualness*) merupakan sifat fakta bahan baku berita yang terdiri dari fakta sosiologis dan psikologis.
2. Akurasi (*accuracy*) yaitu adanya kesesuaian fakta dengan peristiwa serta keakuratan mengenai data-data (pencantuman nama narasumber, jumlah, waktu yang jelas, tempat). Hal tersebut dapat diketahui dengan ada tidaknya cek dan ricek yang dilakukan oleh wartawan dalam sebuah berita.
3. Kelengkapan (*completeness*), dalam praktik jurnalisme sebuah berita setidaknya harus memenuhi unsur 5W+1H, (*what, when, where, who, why* dan *how*) agar sebuah berita dapat dipahami dengan baik. Unsur tersebut menjadi unsur kelengkapan sebuah berita, dan berikut ulasannya:

a. *What* (Apa)

Unsur “apa” dalam hal ini adalah mencari tahu hal yang menjadi topik dalam berita tersebut.

b. *When* (Kapan)

Unsur “kapan” dalam hal ini berarti kapan tersebut terjadi yang mencakup tahun, bulan, hari, jam dan lain-lain.

c. *Where* (Dimana)

Unsur “dimana” dalam hal ini berarti dimana peristiwa tersebut terjadi.

d. *Who* (Siapa)

Unsur “siapa” dalam hal ini berarti siapa yang menjadi aktor/pelaku dalam berita tersebut.

e. *Why* (Mengapa)

Unsur “mengapa” dalam hal ini berarti mengapa peristiwa tersebut terjadi.

f. *How* (Bagaimana)

Unsur “bagaimana” dalam hal ini berarti bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasinya.

4. Relevan (*relevance*), kriteria ini erat kaitannya dengan nilai-nilai berita yang terkandung dalam sebuah pemberitaan. Nilai berita itulah yang menjadi penentu layak atau tidaknya suatu peristiwa diberitakan, sehingga diharapkan berita yang nantinya di sebarluaskan merupakan berita-berita yang berpengaruh terhadap masyarakat. Berita yang

relevan dapat diketahui dengan melihat kesesuaian berita yang dipublikasikan dengan beberapa standar *significance*. Beberapa kriteria utama dari standar tersebut yaitu :

- a. Penting (*significance*), yaitu kejadian yang dapat mempengaruhi orang banyak atau kejadian yang punya dampak terhadap kehidupan para pembaca.
- b. Besaran (*magnitude*), yaitu sesuatu yang besar dari segi jumlah, nilai, atau angka yang besar hitungannya sehingga pasti menjadi sesuatu yang berarti dan menarik untuk diketahui oleh orang banyak.
- c. Kebaruan (*timeliness*), memuat peristiwa yang baru saja terjadi, karena kejadiannya belum lama, hal ini menjadi aktual atau masih hangat dibicarakan umum. Aktual berkaitan dengan tenggat waktu bahwa kejadian tersebut bukan berita basi atau terlambat memenuhi waktu pemuatan yang sudah ditetapkan pemimpin redaksi.
- d. Kedekatan (*proximity*) yaitu memiliki kedekatan jarak (geografis) ataupun emosional dengan pembaca, termasuk kedekatan karena profesi, minat, bakat, hobi, dan perhatian pembaca.
- e. Tenar (*Prominance*), yaitu menyangkut hal-hal yang terkenal dari seseorang atau benda seperti orang ataupun tempat.

## 5. Keseimbangan (*balance*)

- 1) *Cover Both Side* yaitu pemeberian porsi yang sama terhadap pihak-pihak yang bertentangan dalam sebuah peristiwa secara bersamaan dan proporsional.
  - a. Satu sisi yaitu ketika berita hanya berisi pendapat maupun pernyataan satu orang narasumber saja.
  - b. Dua sisi yaitu ketika berita memuat dua narasumber yang berlainan.
  - c. Multi sisi, yaitu ketika berita memuat pandangan dari berbagai pihak, sehingga objektivitas tetap terjaga.
- 2) *Even Handed Evaluation* yaitu, penggambaran berita terhadap fakta maupun pihak-pihak yang menjadi berita secara proporsional.
  - a. Positif yaitu, ketika berita yang disajikan berisi hal positif atau pro terhadap pihak-pihak yang diberitakan.
  - b. Negatif, yaitu ketika berita yang disajikan berisi hal negatif atau kontra terhadap pihak-pihak yang diberitakan.
  - c. Netral, yaitu ketika berita yang disajikan berisi hal positif dan negatif.

## 6. Netralitas (*Neutrality*)

- 1) *Non- Sensational* yaitu fakta ditulis apa adanya tanpa ada unsur dilebih-lebihkan dengan memainkan kata ataupun kalimat.



- 2) *Non-Evaluatif* yaitu melihat ada tidaknya pencampuran fakta dan opini dari wartawan dalam sebuah berita yang mengarah kepada benar maupun salahnya salah satu pihak .

## G. Definisi Operasional

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Indikator tersebut merupakan konsep objektivitas yang dikembangkan oleh Westerstahl. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator tersebut, maka dapat digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Definisi Operasional Objektivitas**

|  |   |
|--|---|
| 1. Kefaktualan   |   |
| Indikator  |   |
| a. Fakta sosiologis yaitu berita yang dibuat berdasarkan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya/nyata tanpa memuat unsur opini.   |   |
| b. Fakta psikologis yaitu berita yang dibuat berdasarkan atas opini seseorang mengenai sebuah peristiwa/fakta (interpretasi subjektif) yang berupa pernyataan, pendapat dan penilaian. |   |
| 2. Keakuratan  |   |
| Indikator  |   |
| Berita dikatakan akurat apabila terdapat konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan dalam sebuah berita   |   |
| 3. Kelengkapan   |   |
| Indikator  |   |
| Berita dikatakan lengkap apabila isi berita memenuhi semua unsur 5W+1H   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>What</i> (peristiwa apa yang terjadi)</li> <li>2) <i>Where</i> (dimana peristiwa tersebut terjadi)</li> <li>3) <i>When</i> (kapan peristiwa tersebut terjadi)</li> <li>4) <i>Who</i> (siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut)</li> <li>5) <i>Why</i> (kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi)</li> <li>6) <i>How</i> (bagaimana peristiwa tersebut terjadi)</li> </ol> |
| 4. Relevan   |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Indikator</b>  |  |
| Berita dikatakan relevan apabila berita yang disajikan memenuhi beberapa standar <i>significance</i> ( <i>penting</i> ) seperti <i>timeliness</i> , <i>magnitude</i> , <i>significance</i> , <i>proximity</i> dan <i>prominance</i> . | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>significance</i> (apabila kejadian tersebut mempunyai pengaruh bagi banyak orang)</li> <li>2) <i>timeliness</i> (apabila kejadian tersebut berkaitan dengan hal-hal baru yang terjadi)</li> <li>3) <i>Magnitude</i> (apabila kejadian tersebut berkaitan dengan angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak)</li> <li>4) <i>Proximity</i> (apabila kejadian tersebut memiliki kedekatan jarak ataupun emosional dengan pembaca)</li> <li>5) <i>Prominance</i> (apabila kejadian tersebut menyangkut hal-hal yang terkenal seperti orang ataupun tempat)</li> </ol> |
| <b>5. Keberimbangan</b>   |  |
| <b>Indikator</b>  |  |
| a. <i>Cover both side</i> (Berita dikatakan berimbang apabila terdapat pemberian porsi yang sama terhadap pihak-pihak yang bertentangan dalam peristiwa tersebut secara bersamaan)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Liputan satu sisi (ketika berita hanya menampilkan satu orang narasumber saja)</li> <li>2) Liputan dua sisi (ketika berita menampilkan dua narasumber yang berlainan)</li> <li>3) Liputan multi sisi (ketika berita menampilkan berbagai pandangan dari berbagai narasumber)</li> </ol>  |
| b. <i>Even-handed evaluation</i> (berita dikatakan berimbang apabila isi berita tidak memihak)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Positif (pro Ahok), apabila berita cenderung memberitakan Ahok secara positif.</li> <li>2) Negatif (tidak pro Ahok), apabila berita cenderung memberitakan Ahok secara negatif.</li> <li>3) Netral, apabila berita tidak memihak terhadap siapapun berisi positif dan negatif.</li> </ol>  |
| <b>6. Netralitas (<i>Neutrality</i>)</b>  |  |
| <b>Indikator</b>  |  |
| a. <i>Non sensational</i> (berita ditulis apa adanya tanpa memuat unsure yang dilebih-lebihkan dengan memainkan kata ataupun kalimat/ tidak didramatisasi).   |  |
| b. <i>Non evaluative</i> (berita dikatakan netral apabila wartawan tidak mencampurkan opini atau pendapat pribadinya dalam sebuah berita yang mengarah benar atau salahnya salah satu pihak).   |  |

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis isi. Analisis isi merupakan metode penelitian untuk melukiskan atau memetakan isi komunikasi yang nyata secara deskriptif, sistematis, dan kuantitatif. Menurut Eriyanto, analisis isi adalah teknik penelitian ilmiah untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi (Eriyanto, 2011: 15). Peneliti menggunakan analisis isi kuantitatif untuk menganalisis objektivitas media dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada surat kabar *Kompas* periode 8 Oktober 2016-30 November 2016 melalui unit analisis dan kategori-kategori yang telah ditentukan.

### a. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah berita mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada surat kabar *Kompas* periode 8 Oktober 2016-30 November 2016. Dalam kurun waktu tersebut, *Kompas* berhasil memuat 40 buah artikel berita terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Periode waktu tersebut dipilih karena karena berita sedang hangat-hangatnya diperbincangkan.

**Tabel 1.2**

**Daftar Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok  
di SKH Kompas**

| <b>No</b> | <b>Tanggal</b> | <b>Judul berita</b>   |
|-----------|----------------|---|
| 1         | 08-10-2016     | Ancaman Pidana bagi Kampanye Sara                                 |
| 2         | 14-10-2016     | Kedepankan Persaingan Ide, Bukan Isu Primordial                   |
| 3         | 25-10-2016     | Basuki Klarifikasi ke Bareskrim                                   |
| 4         | 02-11--2016    | Presiden Tidak Akan Intervensi                                    |
| 5         | 03-11-2016     | Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat                              |
| 6         | 03-11-2016     | Anggota Ormas Tolak Basuki  |
| 7         | 04-11-2016     | Presiden dan Wapres Berkantor Seperti Biasa                       |
| 8         | 05-11-2016     | Menyampaikan Aspirasi Sambil Bersih-Bersih                        |
| 9         | 05-11-2016     | Unjuk Raraa di Daerah Berlangsung Damai                           |
| 10        | 06-11-2016     | Tudingan Ada Aktor dalam Demo Tak Mendasar                        |
| 11        | 07-11-2016     | Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan                     |
| 12        | 08-11-2016     | Presiden Menemui Sejumlah Pihak                                   |
| 13        | 09-11-2016     | Presiden Tak Akan Lindungi Basuki                                 |
| 14        | 09-11-2016     | Penyidik Masih Kumpulkan Keterangan                               |
| 15        | 09-11-2016     | Unjuk Rasa dan Ujian Demokrasi                                    |
| 16        | 10-11-2016     | Sekitar 20 Ormas Islam Diundang ke Istana                         |
| 17        | 10-11-2016     | Perludem Desak Bawaslu Tindak Tegas Penghalang Kampanye           |
| 18        | 11-11-2016     | Safari Presiden Berlanjut   |
| 19        | 11-11-2016     | Saat Joko Widodo Mendengar Sambil Lesehan                         |
| 20        | 11-11-2016     | Wali Kota Jakarta Barat Amankan Situasi, Tak Ikut Kampanye Djarot |
| 21        | 12-11-2016     | Silaturahmi Perlu Terus Dijaga                                    |
| 22        | 13-11-2016     | Presiden: Saling Ejek dan Memaki Bukan Jati Diri Bangsa           |
| 23        | 14-11-2016     | Saat Jokowi Bersama Tiga Parpol                                   |
| 24        | 14-11-2016     | Hasil Penyelidikan Segera Diumumkan                               |
| 25        | 15-11-2016     | Jaga Independensi Polri, Komisi III DPR Tak Hadiri Gelar Perkara  |
| 26        | 16-11-2016     | Masyarakat Diminta Percaya Gelar Perkara                          |
| 27        | 17-11-2016     | Pencalonan Basuki di Pilkada DKI Tidak Gugur                      |
| 28        | 17-11-2016     | Aktor Politik   |
| 29        | 18-11-2016     | Pesan Politik dari Beranda Istana                                 |
| 30        | 19-11-2016     | Doa Bersama untuk Kedamaian Bangsa                                |
| 31        | 21-11-2016     | Megawati Soekarnoputri Bertemu Setya Novanto                      |
| 32        | 22-11-2016     | Presiden Makan Siang Bersama Megawati Soekarnoputri               |
| 33        | 22-11-2016     | Suguhan untuk Presiden  |

|    |            |  |
|----|------------|--|
| 34 | 23-11-2016 | MUI : Kedepankan Diplomasi                                     |
| 35 | 23-11-2016 | Membaca Pesan Presiden Dari Istana                             |
| 36 | 24-11-2016 | Polri Limpahkan Berkas Basuki Besok                            |
| 37 | 25-11-2016 | Berkas Perkara Basuki Dilimpahkan Hari Ini                     |
| 38 | 29-11-2016 | Demokrasi Tetap Jalan Terbaik                                  |
| 39 | 29-11-2016 | Semua Kebutuhan Peserta Aksi Disiapkan di Kawasan Silang Monas |
| 40 | 30-11-2016 | Dunia Usaha Berharap Aksi 2 Desember Berlangsung Damai         |

b. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan berita mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada surat kabar *Kompas* periode 8 Oktober 2016-30 November 2016. Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah 40 artikel berita.

Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi. Dalam penarikan sampel tidak terdapat ketentuan pasti mengenai jumlah besar kecilnya, yang terpenting adalah pengambilan sampel haruslah representative atau mampu mewakili secara keseluruhan (Kriyantono, 2008:151). Dalam penelitian ini, total sampling ada 40 artikel berita.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mendokumentasikan (berupa mencari, mengumpulkan dan mengkliping) berita dari surat kabar terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnalam (Ahok) pada

surat kabar *Kompas* periode 8 Oktober 2016-30 November 2016. Selanjutnya berita yang memenuhi kualifikasi akan dianalisis menggunakan lembaran koding (*coding sheet*) yang dibuat berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Selain artikel berita dan lembar koding, peneliti juga melengkapi data dari sumber lain seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan sejumlah artikel dari internet yang relevan dengan topik penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian mengenai objektivitas media terhadap pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada surat kabar *Kompas* periode 8 Oktober 2016- 30 November 2016, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis isi deskriptif kuantitatif. Hasil perhitungan tersebut dicantumkan kedalam lembar *coding sheet* untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Membuat tabel frekuensi kemunculan berita sesuai dengan kategorisasi yang telah ditentukan dalam penelitian.
- 2) Menginterpretasikan data-data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

e. Validitas

Validitas adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai benar-benar tepat mengukur konsep yang ingin diukur. Menurut Krippendorff (dalam Eriyanto, 2011:259), menyatakan bahwa arti penting validitas ini dikatakan sebagai “kualitas penelitian yang membawa seseorang untuk meyakini bahwa fakta-fakta yang ada tidak dapat ditentang. Ia mengukur apa yang didesain untuk diukur, dan kita menganggap analisis valid sejauh inferensinya atas dasar pembuktian yang dicapai secara independen. Validitas ini menjadi penting dalam analisis isi, karena jika alat ukur yang dipakai salah, dapat dipastikan temuan-temuan yang dihasilkan juga tidak dapat dipercaya.

Terdapat beberapa jenis validitas dalam analisis isi, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas konstruk. Validitas konstruk adalah jenis validitas yang melihat apakah alat ukur disusun atau diturunkan berdasarkan suatu kerangka teori tertentu (Neuendorf dalam Eriyanto, 2011:268). Alat ukur disebut mempunyai validitas konstruk jikalau alat ukur tidak asal disusun, tetapi diturunkan berdasarkan suatu teori yang telah teruji (Eriyanto, 2011:268).

f. Reliabilitas

Hasil pengukuran data yang dilakukan peneliti harus memiliki reliabilitas (keandalan) yang tinggi. Hasil penafsiran *coder* pertama tidak boleh berbeda dengan *coder* lainnya, karena penelitian dilakukan bukan

berdasarkan penafsiran subjektif dari *coder*, namun berdasarkan alat ukur yang terpercaya yaitu lembar koding (*coding sheet*).

Alat ukur lembar koding bukan merupakan alat ukur yang sempurna, selalu ada perbedaan hasil dari sesama *coder* dalam menilai data. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu melakukan uji coba penghitungan *coeficient reliability* terlebih dahulu. Uji reliabilitas ini akan menunjukkan berapa besar presentase persamaan antar *coder* ketika menilai suatu isi yang akan menentukan apakah selanjutnya penelitian layak untuk diteruskan atau tidak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus pengukuran yang dikemukakan oleh Ole R. Holsti. Uji reliabilitas ini membantu peneliti untuk melihat sejauh mana persetujuan dua pengkoding dalam melihat fenomena pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama pada surat kabar *Kompas*. Berikut ini merupakan rumus Holsti yang digunakan peneliti :

$$\text{Reliabilitas antar-coder} = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan :

CR : *Coeficient of Reliability*

M : Jumlah pernyataan yang disetujui pengkoding



N1 : Jumlah koding yang dibuat oleh *coder* 1.

N2 : jumlah koding yang dibuat oleh *coder* 2.

Dalam penelitian ini, peneliti akan dibantu oleh *coder* kedua yaitu Jauharotul Ulumiyah seorang mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) angkatan 2013. Alasan peneliti untuk memilih Ulumiyah karena dianggap mempunyai kemampuan dalam hal analisis isi dan pemberitaan. Selain itu, Ulumiya juga pernah mempunyai pengalaman magang di sebagai wartawan di surat kabar lokal Harian Jogja selama kurun waktu dua bulan.

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada satupun yang disetujui oleh para *coder* dan 1 berarti persetujuan sempurna diantara para *coder*. Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka reliabilitas. Berdasarkan formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70 %. Artinya jika perhitungan menunjukkan angka reliabilitas diatas 0,7 berarti alat ukur ini reliable. Tetapi jika di bawah 0,7 berarti alat ukur bukan alat yang reliabel (Eriyanto, 2011: 290).